

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pondok pesantren adalah salah satu bentuk pembelajaran agama Islam yang khas di Indonesia. Peran sentral kyai di dalam pondok pesantren merupakan salah satu yang menjadi pembeda dengan proses institusi pendidikan di luar pondok pesantren. Perkembangan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan faktor lingkungan lainnya memberi dampak terhadap peran dan kedudukan pondok pesantren. Pondok pesantren dalam sejarah Indonesia dapat di telusuri keberadaannya sampai abad ke-13 M yaitu sebagai lembaga pendidikan yang berkembang subur di pedesaan dan kota-kota terpencil dimana pondok pesantren mempunyai tujuan untuk mendidik para santri agar dapat mengerti nilai-nilai keagamaan Islam dan diharapkan agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Sebagai organisasi nirlaba, Pondok Pesantren juga dapat digambarkan sebagai yayasan, organisasi non-pemerintah yang beroperasi di luar kerangka politik yang dilembagakan dan merupakan entitas layanan sukarela yang mencoba membantu orang lain dalam menghilangkan masalah sosial. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 menjelaskan yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan ditugaskan untuk kepentingan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tetapi tidak mempunyai anggota.<sup>2</sup>

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD/PNF) telah menyetujui 184 Pondok Pesantren pada tahun 2018 di bawah Kementerian Agama. Sebagai syarat akreditasinya, pesantren harus meningkatkan standar pengajaran dan pengelolaan

---

<sup>1</sup> Muhamad Rozaidin dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan)," *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 4, no. 2 (2020): 123, <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3716>.

<sup>2</sup> Ifitita Kurnia Rahmadina, "Penerapan Akuntansi Pesantren Terhadap Responsibility Laporan Keuangan Usaha Di Pondok Pesantren Darul Hidayah Bangsalsari-Jember," n.d., <http://digilib.uinkhas.ac.id/9884/>.

keuangan. Sehingga dari hal tersebut urgensi pesantren terhadap akuntansi keuangan pesantren tentunya semakin meningkat. Keuangan di pondok pesantren merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran operasional sekolah. Akuntansi pesantren juga dikenal keuangan pesantren. Ada banyak langkah yang terlibat dalam akuntansi pesantren termasuk; perencanaan dan pengaturan terkemuka, pemantauan dan mengendalikan. Akuntabilitas dan transparansi di pesantren lebih ditingkatkan dengan sistem akuntansi komprehensif yang melacak setiap sen yang dihabiskan.<sup>3</sup>

Pengelolaan pada pondok pesantren dianggap seperti sebuah lembaga yang kuno, melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku bukanlah yang mudah. Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.<sup>4</sup> Menurut Komariah “Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yaitu (1) Neraca dan (2) Laporan Laba-Rugi”.<sup>5</sup> Tujuan laporan keuangan yang menggunakan dasar akuntansi syari’ah, adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari’ah dalam semua bisnis dan transaksi yang dilakukan dalam entitas syari’ah.<sup>6</sup>

Akuntansi merupakan hal yang terpenting dalam sebuah organisasi, tidak dapat dipungkiri sukses tidaknya sebuah organisasi salah satunya tergantung tentang bagaimana mengelola keuangan organisasi tersebut. Saat ini masih sekali pesantren di luar sana yang merasa masih kesulitan dalam mengelola dana, baik dalam proses kegiatan sehari-hari pesantren maupun dalam penganggaran, akuntansi, pengaturan administrasi, alokasi, dan tuntutan pembangunan. Banyak

---

<sup>3</sup> Didik Rahman, “Penerapan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Nurul Jadid Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren,” 2021, 6.

<sup>4</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi, edisi revisi 2011* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), bk. 105.

<sup>5</sup> Mutiara Nur’ Rahmah dan Euis Komariah, “Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI (Studi Kasus PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK),” 2016, 16.

<sup>6</sup> Nova Santi, “Analisis Pelaporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren,” 2019.

pesantren memiliki sumber daya manusia dan alam yang melimpah, namun sumber daya tersebut tidak dikelola dengan baik. Sementara pesantren selalu menjadi lembaga yang mengatur diri sendiri, akan sangat ideal jika mereka dapat mengadopsi praktik manajemen yang akan bermanfaat bagi masyarakat serta siswa dan guru lembaga tersebut. Banyak program pendidikan di pesantren terhambat oleh manifestasi dalam pengelolaan keuangan.<sup>7</sup>

Mengingat kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Menurut Renitasari Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi penampung penyelenggaraan aktivitas publik agar bisa menerangkan dan menjawab semua hal mengenai langkah dari semua keputusan dan proses yang dilakukan, dan bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil serta kemampuan.<sup>8</sup> Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ada dorongan untuk memperkuat sistem akuntabilitas pondok.<sup>9</sup> Faktor-faktor ini yang menyebabkan pondok pesantren terlibat dalam akuntabilitas publik. Dikarenakan dana terbesar berasal dari santri, penyusunan laporan keuangan pondok pesantren juga merupakan cara untuk menunjukkan transparansi dari pihak pesantren dalam mengelola keuangan untuk seluruh orang di pesantren. Semua itu menunjukkan bahwa Pondok Pesantren secara terbuka menyediakan data yang relevan dan material, yang semuanya dapat diakses dan dipahami pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup> Namun, banyak pondok pesantren yang menghadapi masalah terkait anggaran, akuntansi, alokasi, manajemen administrasi dan persyaratan pengembangan pondok.<sup>11</sup> Ini karena mereka

---

<sup>7</sup> A. Halim, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), bk. 80.

<sup>8</sup> renitasari, "Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek," *Regulation*, no. 1831 (2020): 2006–8.

<sup>9</sup> IAI, "Pedoman Akuntansi Pesantren," *Bank Indonesia*, 2020, 5–24.

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar, "Analisis akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1866–79.

<sup>11</sup> Citra Sukmadilaga, "Sosialisasi Pengimplementasian Pedoman Akuntansi Pesantren Berbasis Digital Pada Pesantren Di Indonesia," *Dharmakarya* 10, no. 2 (2021): 115, <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i1.25353>.

tidak tahu cara membuat laporan.<sup>12</sup> Dengan demikian Akuntansi Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) memutuskan mengeluarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Pedoman Akuntansi Pesantren diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) untuk menyusun laporan keuangan yang tidak mengikat dan mendukung kemajuan ekonomi Pondok Pesantren.<sup>13</sup> Pedoman Akuntansi Pesantren berlaku bagi organisasi Pondok Pesantren yang berbentuk yayasan.<sup>14</sup> maka laporan keuangan suatu Pondok Pesantren harus disusun sesuai dengan ISAK 35 tentang laporan keuangan.<sup>15</sup>

Pedoman Akuntansi Pesantren pertama kali dikeluarkan bersamaan dengan kegiatan Indonesia Shhari'a Economic Festival (ISEF) yang ke-4 di *Grand City Convention Center* Surabaya pada 08 November 2017 dan mulai berlaku pada Mei 2018.<sup>16</sup> Pedoman ini dibuat untuk mematuhi ISAK 35 tentang laporan keuangan Nonlaba. Sebagai lembaga nirlaba, pondok pesantren menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai acuan. Pendapat SAK ETAP sebagai acuan dari Pedoman Akuntansi Pesantren adalah aset milik pondok pesantren yang nilainya relatif tinggi dan sebagian besar dari aset pondok pesantren merupakan waqaf permanen yang berupa tanah.<sup>17</sup>

Mulai tanggal 1 Januari 2020, pada saat penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, acuan tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba melainkan mengacu pada ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 telah efektif dicabut dan tidak digunakan lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45. Sebaliknya, DSAK IAI menerbitkan

---

<sup>12</sup> Muhammad Aldi Firmansyah, "Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada Toko Meubel Zulfa Galery)," *jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2018), jimfeb.ub.ac.id.

<sup>13</sup> Pedoman Akuntansi Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*, n.d.

<sup>14</sup> Pesantren.

<sup>15</sup> IAI, "DE SAK Entitas Privat," *Ikatan Akuntansi Indonesia*, 2020, 271.

<sup>16</sup> Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*.

<sup>17</sup> "Ikatan Akuntan Indonesia," 2017.

ISAK 35 berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 pada waktu yang bersamaan.<sup>18</sup>

Masalah yang dialami pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi adalah sedikitnya sumber daya yang berkompeten di bidang akuntansi, dan juga pihak pondok pesantren belum mengerti terkait standar akuntansi yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pesantren yang belum memahami pentingnya menyusun laporan keuangan yang sesuai standar berlaku umum. Pedoman Akuntansi Pesantren adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pesantren di Indonesia. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menerapkan pedoman akuntansi pesantren tersebut.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Suherman menunjukkan bahwa Pondok pesantren Al-Matuuq belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren ataupun PSAK No 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Laporan keuangan yang disajikan oleh pondok pesantren Al-Matuuq hanya neraca, laporan operasional, laporan arus kas saja, dan belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren.<sup>19</sup> Tidak beda jauh dengan penelitian yang dilakukan Sudibyo & Susilowati yang menunjukkan belum adanya yayasan pendidikan yang memahami dan menggunakan PSAK No 45. Pesantren belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren dan PSAK No 45 tentang Laporan keuangan pesantren: 1) Laporan posisi keuangan (neraca) 2) Laporan aktivitas 3) Laporan arus kas dan 4) Catatan atas laporan keuangan, belum ditemukan dalam laporan keuangan pesantren yang kami temui.<sup>20</sup>

Begitu pula dengan temuan yang dilakukan oleh Sonia Mustika Munggaran yang menunjukkan bahwa belum adanya sistem akuntansi pondok yang sempurna pada Pondok

---

<sup>18</sup> Pesantren, *Bab I Pendahuluan Pedoman Akuntansi Pesantren*.

<sup>19</sup> Jati Jurnal, Akuntansi Terapan, dan Lukas Pamungkas Suherman, "Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren: Studi pada Pondok Pesantren Al-Matuuq Sukabumi" 2, no. 2 (2019): 65–70.

<sup>20</sup> Dewi Susilowati Yudha Aryo Sudibyo, "SAR ( Soedirman Accounting Review ): Journal of Accounting and Business," no. 45 (n.d.).

Pesantren Darul Halim. Laporan keuangan masih sederhana dan belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren.<sup>21</sup> Serta temuan oleh Nikatul Aliyah yang menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Karimiyyah belum melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai standar umum dan hanya melakukan pencatatan manual atas semua transaksi yang terjadi.<sup>22</sup> Kajian mengenai akuntansi pesantren juga dilakukan oleh Sholikha, Yudha Aryo Sudiby, Dewi Susilowati yang menunjukkan bahwa sebagian besar laporan yang disajikan oleh pondok pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan diperoleh fakta bahwa sebagian besar pesantren belum menerapkan PSAK 45.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memperkenalkan Pedoman Akuntansi Pesantren sekaligus menyusun laporan keuangan Pondok Pesantren. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN BERDASARKAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum di Kota Kudus).

Mengingat pondok pesantren ini terus berjalan dan berkembang dengan baik maka diperlukan laporan keuangan yang penyusunannya memiliki dasar. Peneliti akan mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan pondok pesantren, khususnya dalam pemecahan masalah pondok pesantren untuk dapat melihat kinerja keuangan selama satu periode dapat dilihat pada laporan aktivitas sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren. Perubahan penyesuaian bentuk laporan keuangan ini juga dimaksudkan agar dapat menjadi salah satu alat ukur kinerja bagi lembaga pemerintah, donatur, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait.

---

<sup>21</sup> Sonia Mustika Munggaran dan Kata Kunci, “Penyusunan Sistem Akuntansi Pokok Pondok Pesantren Daarul Haliim Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren,” 2020, 26–27.

<sup>22</sup> Nikmatul Aliyah, “Kesiapan Pondok Pesantren Dalam Menerapkan Akuntansi Pesantren,” 2019.

<sup>23</sup> Yudha Aryo Sudiby, “SAR ( Soedirman Accounting Review ): Journal of Accounting and Business.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang diperoleh adalah Bagaimana penerapan laporan keuangan Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kota Kudus berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk Mengimplementasikan laporan keuangan Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kota Kudus berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat :

### **1. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Untuk memperluas pengetahuan yang sudah didapat dari teori dan kondisi yang sebenarnya tentang objek yang diteliti dan dengan menerapkannya juga dapat memperluas pengetahuan yang lebih.

#### **b. Bagi Pesantren**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren sesuai standar yang berlaku. Serta diharapkan dapat membantu pesantren dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangannya.

### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperluas pengetahuan mengenai penggunaan kebijakan akuntansi pesantren dalam penyusunan laporan keuangan pesantren.